Journal of Society and Development

Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Mantan Para Pekerja Perempuan di Kota Bandung

Rika Dilawati*[1], Eni Zulaiha[2], Yeni Huraiani[3]

[1] UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; rikadilawati@gmail.com
[2] UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; enizulaiha@uinsgd.ac.id
[3] UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; yenihuriani@uinsgd.ac.id

***** Correspondence: rikadilawati@gmail.com

Abstract: This paper will discuss the strategies of former female workers who were laid off due to the Covid-19 pandemic in strengthening family resilience. The case study taken is a female worker who is the backbone of a family who is domiciled in the city of Bandung, West Java. This paper uses a qualitative method with data collection through in-depth interviews (indept-interview). This study found that female workers faced a very big dilemma when they lost their jobs and had to take care of their children at home due to online school switching. Thus, women workers are trying to find alternatives to meet the financial needs of their families. Generally they work by selling with a small capital base, and some only expect help from the government while exchanging roles with their husbands. Termination of employment (PHK) experienced by female workers also still leaves gender discrimination, both from the company where she works, educational institutions to community constructs. Women's resilience in carrying out double burdens is proof that they have power over themselves and their families, but when facing a wider environment they are still trapped in a patriarchal culture.

Keywords: Covid-19; family resilience; female workers; gender discrimination; violence.

Abstrak: Tulisan ini akan membahas strategi mantan pekerja perempuan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 dalam memperkuat ketahanan keluarga. Studi kasus yang diambil adalah pekerja perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga yang berdomisili di Kota Bandung, Jawa Barat. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam *(indept-interview).* Penelitian ini diperoleh temuan bahwa para pekerja perempuan mengalam dilema yang sangat besar ketika kehilangan pekerjaan dan harus mengurus anak-anaknya di rumah akibat pengalihan sekolah secara daring. Maka demikian, para pekerja perempuan berupaya menemukan alternative untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarganya. Umumnya mereka bekerja dengan berjualan dengan basis modal sedikit, dan ada pula yang hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah sembari bertukar peran dengan suami. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh para pekerja perempuan juga masih menyisakan diskriminasi gender, baik dari perusahaan tempat ia bekerja, institusi pendidikan hingga konstruk masyarakat. Ketahanan perempuan dalam melaksanakan beban ganda menjadi bukti bahwa mereka memiliki kuasa atas diri dan keluarganya, namun ketika menghadapi lingkungan yang lebih luas mereka tetap terkungkung budaya patriarki.

Kata Kunci: Covid-19; diskriminasi gender; kekerasan; ketahahan keluarga; pekerja perempuan.

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia menyebabkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan (Darmawan, Miharja, Waluyajati, & Isnaeniah, 2020; Darsono, Rohmana, & Busro, 2020; Jubba, 2021; Qadri, 2021; Tesarik, 2020). Dalam aspek ekonomi dampak pandemi Covid-19 dapat dilihat dari sudut pandang makro dan mikro. Secara makro dampak ekonomi terlihat dari menurunnya tingkat PDB nasional. Data berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen *(year on year/yoy* (Fauzia, 2020)*).* Hal ini disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat

akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah Indonesia (Thorik, 2020). Sementara secara mikro dampak dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi melanda ketahanan ekonomi keluarga (Shahreza & Lindiawatie, 2021). Hal ini kemudian menimbulkan dampak lainnya seperti kekerasan pada keluarga, diskriminasi gender, dan perceraian keluarga (Bainus & Rachman, 2021).

Selanjutnya, pandemi Covid-19 juga menyebabkan berbagai perubahan pada institusi pekerjaan dan pendidikan (Haekal & Fitri, 2020). Banyak perusahaan yang memutuskan untuk merumahkan para pekerjanya karena alasan krisis keuangan dan efisiensi perusahaan (Dharmawan, 2021). Dampak ini juga melanda para pekerja perempuan yang mengalami pemutusaan hubunga kerja. Hal ini menjadi pukulan berat pekerja perempuan apalagi yang menjadi tulang punggung keluarga. Di sisi lain, bagi para pekerja yang masih memperoleh kesempatan untuk bekerja harus menghadapi tantangan menerima beban ganda ketika proses pendidikan anak-anaknya dialihkan ke rumah (daring) (Malik & Naeem, 2020). Jika sebelumnya beban sekolah anak-anak bisa dipermudah karena pembelajaran dilaksanakan di sekolah, kini para ibu harus menghadapi realita dengan tanggung jawab sekolah anak-anak di rumah. Alhasil, perubahan ini mewajibkan perempuan untuk bisa beradaptasi dan menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, kebutuhan ekonomi di sisi lain kewajiban pendidikan sang anak.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan telah diteliti secara ekstensif sesuai dengan tren penelitian pandemi akhir-akhir ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat (AS), pandemi setidaknya mengakibatkan dua perubahan: *pertama*, aturan kerja yang lebih fleksibel; dan *kedua*, perubahan norma sosial rumah tangga tentang tanggung jawab perempuan dan suami (Alon, Doepke, Olmstead-Rumsey, & Tertilt, 2020). Banyak perusahaan di Amerika Serikat yang mengadaptasi gaya kerja mereka secara daring. Meskipun faktanya lebih menguntungkan bagi karyawan kerah putih untuk pindah ke mode kerja online ini, sebaliknya pekerja kerah biru dirugikan dengan mode kerja ini. Lebih jauh, di dalam rumah tangga, pandemi telah mendorong negosiasi antara istri dan suami tentang perawatan anak.

Kemudian, penelitian selanjutnya dilaksanakan di Malaysia dengan budaya masyarakat patriarki yang dominan. Ditemukan bahwa peran perempuan sangat difokuskan di rumah, terlepas dari status mereka sebagai ibu rumah tangga atau perempuan profesional. Pemerintah Malaysia memberlakukan karantina wilayah selama dua minggu selama pandemi Covid-19 pada Maret 2020. Pemerintah hanya mengizinkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang keluar rumah, misalnya untuk membeli kebutuhan pokok. Sementara itu, perempuan, terlepas dari pekerjaan mereka seperti pekerja harus menghabiskan berhari-hari di rumah karena menghindari denda atau dituntut oleh petugas keamanan yang mengelola karantina wilayah tersebut (McLaren, Wong, Nguyen, & Mahamadachchi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran gender para pembuat kebijakan memiliki efek merugikan tidak hanya pada individu perempuan dan keluarga mereka, tetapi juga pada layanan publik, khususnya sektor kesehatan, yang dalam keadaan hiruk pikuk akibat pandemic (Sundarasen et al., 2020).

Sementara di Indononesia, penutupan sekolah dan penitipan anak akibat pandemi memaksa orang tua yang bekerja untuk tidak hanya merawat anak-anak mereka, tetapi juga menjadi guru pengganti yang menawarkan pendidikan alternatif bagi anak-anak mereka (Rachman, 2020). Hal ini terutama berlaku untuk keluarga dengan anak-anak usia sekolah dasar atau usia di bawahnya, karena dua usia tersebut memiliki kebutuhan untuk perawatan dan pengajaran ada di level paling tinggi. Penelitian lainnya menyebut bahwa banyak rumah tangga menunjukkan istri yang bekerja mengalami penurunan jam kerja profesional lebih tinggi dibandingkan suami yang bekerja (Collins, Landivar, Ruppanner, & Scarborough, 2020). Namun penelitian tersebut tidak menjelaskan mengapa jam kerja pekerja perempuan dikurangi, misalnya jika kebijakan tersebut muncul akibat citra perusahaan tentang peran istri yang lebih dominan di rumah.

Jumlah pekerja perempuan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat tinggi di Indonesia. Bulan Maret 2020 saja, data berdasarkan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) menyebut ada sebanyak 2.358 yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Sari, 2020). Sementara menurut Kementerian Ketenagakerjaan pada akhir 2020 terdapat 623.407 buruh perempuan tidak bekerja lagi. Diantaranya, status mereka dirumahkan dan terkena PHK (KSBSI, 2021). Perempuan memang disebut-sebut paling rentan mengalami PHK karena 70% pekerja di sektor kesehatan, sosial, usaha mikro kecil dan menengah, dan pendidikan mayortas di dominasi oleh perempuan. Sektor-sektor tersebut paling terdampak pandemi Covid-19 (Victoria, 2021).

Selanjutnya, beban perempuan semakin tinggi ketika harus menerima pekerjaaan ganda di rumah disamping harus kehilangan pekerjaan dan finansial. Apalagi bagi pekerja perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga atau menjadi pencari nafkah utama. Bukan rahasia umum jika banyak perempuan yang harus

menanggung beban keluarga sendirian. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, mulai dari suami yang sedang sakit, keinginan pribadi, sementara karena suami mengalami pailit, suami tidak bekerja, hingga keahlian tinggi yang dimiliki istri. Sayangnya, tidak semua keputusan perempuan menjadi tulang punggung keluarga datang dari kesepakatan suami dan istri, tidak jarang perempuan terpaksa bekerja karena mengalami kekerasan dari suami (Huriani & Annibras, 2019; Ningrum & Mas' udah, 2021). Hal ini merupakan bentuk dari masih mengakarnya budaya patriarkis di masyarakat. Ideologi patriarki menganggap bahwa kekerasan terhadap isti boleh dilakukan saat istri dianggap tidak patuh atau tidak menurut pada keinginan suami. Akibatnya, istri cenderung menerima segala perlakuan suami yang ditujukan kepadanya meskipun buruk karena dianggap tidak menghargai posisinya sebagai suami (Sakina, 2017).

Selama ini, kehidupan patriarki selalu menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak cukup berkontribusi. Hal ini terutama pada sektor publik seperti pekerjaan dan kebebasan berpendapat diruang publik (Noorchasanah & Muttaqien, 2020). Walby (2014) menyebut bahwa patriarki sebagai sistem, struktur sosial dan praktik dalam masyarakat di mana pria menindas, mendominasi, dan mengeksploitasi perempuan (Walby, Towers, & Francis, 2014). Konteks budaya patriarki ini juga masih terjadi hingga sekarang, bahkan jelas terlihat ketika pandemi Covid-19 berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya anggapan bahwa tanggung jawab domestik hanya milik perempuan saja. Padahal perempuan juga mengalami tantangannya sendiri ketika pandemi berlangsung seperti pemutusan hubungan kerja, beban kerja ganda dalam rumah tangga, hingga tanggung jawab kesuksesan pendidikan anak. Fenomena ini masih dikoonstruksi oleh sebagain masyarakat sehingga akan menimbulkan efek yang berbahaya. Makanya, perlu ditekankan kesadaran tentang pembagian tugas dalam keluarga agar persoalan patriarki di masa pandemi bisa perlahan dihilangkan. Apalagi dalam nuansa krisis akibat wabah adalah momentum yang tepat bagi kembalinya ditekankan budaya gotong royong dalam keluarga.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini melibatkan 10 orang pekerja perempuan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari berbagai perusahaan swasta di Kota Bandung dengan rentang usia 26-42 tahun yang semuanya sudah menikah. Selain itu, para infroman merupakan tulang punggung utama keluarga karena berbagai masalah yang dialami para suaminya. Ada 3 pekerja yang harus bekerja karena terpaksa akibat suami mengalami sakit dan kecelakaan, 6 pekerja karena alasan aktualisasi diri karena keahlian yang dimiliki, dan 1 pekerja yang mengalami kekerasan akibat suami yang malas bekerja. Untuk memperoleh gambaran yang dialami para pekerja, penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam *(indept-interview)* terhadap para informan dengan maksud memperoleh informasi komprehensif mengenai problem dilematis mereka dalam menghadapi beban finansial, proses pendidikan anak, dan diskriminasi yang diterima di ruang publik. Diketahui dari 10 informan, 2 diantaranya masih nemiliki anak dengan usia 6-8 tahun atau usia Taman Kanak-Kanak (TK), 5 masih memiliki anak berusia 8-13 tahun atau berusia Sekolah Dasar (SD), dan 3 informan memiliki usia 13-16 tahun atau usia SMP. Sebagian dari para informan sudah memiliki rumah pribadi, ada yang masih menyewa, dan bahkan masih menumpang bersama keluarga orangtuanya. Proses pengambilan data dilakukan sejak Desember 2020 hingga Juni 2021. Untuk menjaga kenyamanan para informan, nama dan perusahaan yang terkait dengan informan disamarkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Relasi Partriarki dan Kuasa

Anggapan mengenai dominasi laki-laki dalam dunia pekerjaan dipengaruhi oleh faktor patriarki (Muttaqien, 2019; Zulaiha, 2016). Hubungan pria dan wanita secara historis dipandang sebagai hubungan patriarkal. Patriarki berasal dari kata *'patriarch'*. Istilah ini mengacu pada superioritas laki-laki dalam hubungan keluarga. Namun pada perkembangannya, istilah patriarki dipahami *"to refer to male domination, to the power relationships by which men dominate women, an d to characterise a system whereby women are kept subordinate in a number of ways"* (Bhasin, 2006). Menurut kaum feminis, dominasi laki-laki tidak hanya terjadi secara privat tetapi juga dalam hubungan publik laki-laki dan perempuan. Patriaki dijelaskan secara berbeda sesuai kepentingannya; beberapa mendefinisikannya sebagai seperangkat sistem sosial dan fungsional di mana laki-laki mengatur perempuan (Walby, 1990).

Sepanjang perkembangannya, patriarki tidak hanya berarti dominasi laki-laki atas hubungan keluarga, tetapi juga atas institusi masyarakat pada umumnya (Sultana, 2010). Menurut Jagger dan Rosenberg dalam Acker (1989), mekanisme patriarki dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan dipahami sebagai himpunan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan secara material maupun terstruktur dalam rangka membangun atau menegakkan kemandirian dan persatuan laki-laki dalam tatanannya dengan tujuan untuk mengontrol perempuan. Alhasil, deskripsi tersebut berpengaruh pada sistem pekerjaan yang selalu diidentikkan dengan laki-laki. Dominasi ini juga berlaku dalam lingkup keluarga. Setidaknya ini dilandasi oleh alasan bahwa secara teologis dan sosiologis laki-laki selalu dianggap mumpuni dalam segala aspek kehidupan keluarga.

Patriarki selalu berkelindan dengan kuasa (Nurcahyo, 2016). Kuasa sering dipandang negatif sebagai hegemoni, tunggal, dan otoriter. Menurut Weber kuasa adalah*, "power is defines as the probability that one actor within a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance, regardless of the basis on which this probably rests"* (Krott et al., 2014). Akibatnya, Weber mengasosiasikan kuasa dengan dominasi. Istilah "dominasi" diklasifikasikan menjadi dua jenis: dominasi tidak langsung, yang didefinisikan sebagai monopoli atas sumber daya ekonomi, dan dominasi langsung, yang didefinisikan sebagai dominasi atas orang lain (Sydie, 1998). Pada hukum tradisional, kekuasaan diatur secara patrimonial, dengan patriarki sebagai bentuk fundamentalnya. Patriaki adalah jenis dominasi khas yang digunakan oleh kelompok rumah tangga atau kelompok suku yang diatur menurut kekerabatan dan ekonomi.

Namun, demikian penting untuk dimaknai bahwa kuasa tidak bisa berdiri sendiri. Kuasa selalu dipengaruhi oleh aktor dan sistem sosial. Oleh karena itu, dalam memahami kuasa perlu mempertimbangkan korelasi dengan faktor yang melingkupinya. Teori yang bisa menjelaskan ini adalah teori kuasa dari Michel Foucault. Menurut Foucault, kuasa bukanlah produk dari kesadaran; tetapi ini adalah produk aplikasinya *(excercising).* Selain itu, kuasa tidak dimiliki oleh satu subjek tetapi berada dalam tindakan yang mengekspresikannya. Foucault mengeksternalisasi kuasa melalui hubungan anonim sebagai hal yang biasa dan memandang kuasa sebagai produk yang dapat dipertukarkan. Foucault melanjutkan dengan menyatakan bahwa kuasa terjadi ketika individu dipekerjakan dalam serangkaian tindakan terhadap orang lain (Foucault, 1997). Menurut Foucault, kuasa meliputi semua hubungan karena itu adalah salah satu dimensinya. Di mana pun ada hubungan, di situ ada kuasa (Bertens, 1993).

Kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana yang disana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi (Foucault, 1997). Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi (Danaher, Schirato, & Webb, 2000). Menurut Foucault, kekuatan merasuki cara berpikir, berbicara, dan bertindak seseorang, sehingga seseorang yang memiliki kekuatan mengembangkan sudut pandangnya terhadap dunia dan dirinya sendiri. Seseorang yang diberkahi dengan kekuatan, menurut Foucault juga dapat mendisiplinkan dirinya sendiri ke dalam subjek apa pun yang diinginkannya (Gordon, Edwards, & Reich, 1982). *In this way, individuals are 'disiplined' by 'disipline' then the disipline is self disipline and the control is self-control* (Duckworth & Seligman, 2006).

Namun demikian, sepanjang kuasa perempuan masih dilingkupi oleh lingkungan patriarki maka hanya akan berlaku pada dirinya dan lingkungan terkecilnya saja, yaitu keluarga. Itupun jika lingkungan keluarga tidak membatasi perempuan dalam mengambil kuasa, khsusunya suami atau anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, dalam paradigma teori kuasa ini perempuan memiliki kemampuan atas tanggung jawab dalam lingkungan dirinya sendiri, namun kuasa ini hilang ketika bertemu dengan masyarakat luas. Perempuan bisa berperan dominan dalam lingkup keluarganya, tapi perempuan tidak ada apa-apanya ketika dihadapkan pada institusi atau lingkungan yang lebih luas diluarnya. Ketika patriarki hilang dari lingkungan keluarga, maka lingkungan luas belum tentu menghilangkan budaya patriarki terhadap perempuan.

Tulisan ini akan membahas bagaimana kuasa perempuan dalam lingkup keluarga di masa pandemi Covid-19. Tulisan ini memfokuskan pada perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga yang disaat bersamaan menjadi korban PHK perusahaan berusaha berperan dalam keluarganya melalui pemulihan ekonomi, pendidikan, dan lingkungannya. Karenanya, beberapa pertanyaan diajukan, yakni: bagaimana peran perempuan dalam keluarganya ketika menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, dan lingkungan? Dan mengapa perempuan tetap dianggap lemah ketika menghadapi situasi diluar dirinya?

Temuan penelitian

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 informan yang telah dilakukan, maka penelitian ini diperoleh temuan yang diklasifikasikan menjadi tiga kategori perilaku pekerja perempuan: *pertama,* pekerja yang hanya "pasrah" dan mengharap bantuan dari pemerintah; *kedua,* pekerja yang memiliki keahlian lain dan adaptif terharap perkembangan teknologi; dan *ketiga,* pekerja yang mengalami kerusakan hubungan keluarga atau bercerai.

Pertama, pekerja yang pasrah dan mengharap bantuan dari pemerintah diidentifikasi pada para pekerja yang memiliki rentang usia 35-40 tahun. Umumnya para pekerja ini hanya memiliki satu keahlian yang sebelumnya digunakan untuk bekerja di perusahaan sebelum ia di PHK. Ditambah, mereka juga tidak terlalu menguasai keterampilan teknologi dan media sosial yang kebanyakan dijadikan batu loncatan untuk memperoleh penghasilan ketika harus berdiam diri di rumah (Rosmadi, 2021). Penulis memilih mengkategorikan 3 perempuan yang memilih pasrah dan menunggu bantuan dari pemerintah ini. 2 orang perempuan harus dihadapkan pada kenyataan bahwa sang suami mengalami sakit parah yang sudah lama, sementara 1 perempuan dihadapkan pada sang suami mengalami kecelakaan lalu lintas. Ditambah beban ketiga pekerja ini bertambah karena anak-anak mereka masih berusia sekolah yang harus dibina setiap harinya. 2 pekerja memiliki anak yang bersekolah di tingkat SMP, sementara 1 orang lagi memiliki anak usia sekolah di tingkat SD. Jika dijabarkan dalam tabel, maka diperoleh data tabel 1.

Keterangan	**Perempuan 1**	**Perempuan 2**	**Perempuan 3**
Usia	42 tahun	38 tahun	35 tahun
Keahlian Media Sosial	Tidak ada	Sedikit tahu	Sedikit tahu
Keadaan Suami	Sakit menahun	Kecelakaan lalu lintas	Sakit akut
Anak yang Sekolah	1 anak usia SMP	1 anak usia SD	1 anak usia SMP

Tabel 1: Pekerja perempuan yang pasrah dan mengharap bantuan pemerintah (Diolah dari hasil wawancara, 2021)

Kedua, pekerja yang memiliki keahlian lain yang mendukung dalam mendapatkan finansial. Para pekerja ini masih tergolong berusia antara 26-33 tahun. Selain itu, para pekerja ini diidentifikasi pada keputusan meangktualisasikan dirinya ketika memutuskan bekerja sebelum mereka di PHK. Peran suami sebelumnya fokus pada urusan domestik rumah tangga, menjadi guru honorer dengan penghasilan yang minim, dan berjualan online. Para pekerja perempuan ini juga dibekali dengan keahlian lain dalam berjualan dan menggunakan tekonologi serta media sosial untuk berjualan online. Penulis mengkategorikan 6 pekerja yang memiliki kreativitas dalam mengembangkan keahlian lain ini. Mayoritas atau 4 orang pekerja merupakan tamatan sarjana (S1), 1 orang lainnya adalah tamatan SMK, dan 1 lagi tamatan D3. Selanjutnya, diantara para pekerja, 4 diantaranya masih memiliki anak usia sekolah dasar (SD), dan 2 diantaranya masih memiliki anak usia TK. Perempuan dalam kategori ini didominasi oleh para pasangan muda yang baru menikah sehingga komunikasi yang dijalin dengan suami masih sangat baik termasuk mendorong suami untuk mengantikan posisi mereka menjadi tulang punggung utama keluarga. Jika dijabarkan dalam tabel, maka diperoleh data sebagai berikut:

Keterangan	**Pekerja 1**	**Pekerja 2**	**Pekerja 3**	**Pekerja 4**	**Pekerja 5**	**Pekerja 6**
Usia	30 tahun	33 tahun	32 tahun	27 tahun	26 tahun	30 tahun
Keahlian Media Sosial	Cukup Menguasai	Menguasai	Menguasai	Menguasai	Menguasai	Menguasai
Keadaan Suami	Pailit dalam usaha sendiri	Guru honorer	Guru honorer	Guru honorer/guru ngaji	Korban PHK	Berjualan Online
Anak yang Sekolah	1 anak usia SD	1 anak usia SD	1 anak usia SD	1 anak usia TK	1 anak usia TK	1 anak usia SD
Pendidikan Terakhir	S1	D3	S1	S1	SMK	S1

Tabel 2: Pekerja perempuan yang memiliki alternatif dan keahlian lain (Diolah dari hasil wawancara, 2021)

Ketiga, pekerja perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga dan bercerai. Satu perempuan yang ditemukan dalam penelitian ini mengalami kekerasan rumah tangga dari suaminya. Ia berusia 37 tahun dan memiliki satu orang anak yang berusia sekolah SMP. Pekerja ini meutuskan untuk menjadi tulang punggung utama keluarga karena alasan keterpaksaan akibat suami yang tidak mau bekerja atau mencari nafkah. Berbagai

kekerasan yang dialami suami menyebabkan dirinya memilih bekerja sebagai buruh di perusahaan tertentu. Namun, setelah ia di PHK karena pandemi Covid-19, ia memutuskan untuk menggugat suaminya ke pengadilan agama untuk menceraikan suaminya tersebut. Kini ia pulang ke rumah orangtuanya bersama anaknya yang berusia 14 tahun atau menginjak kelas 1 SMP. Selama, tinggal di rumah orangtuanya, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan lain dengan menjadi pelayan restoran dan penjual layanan *(sales)* salah satu produk bank di Indonesia.

Pemulihan Ekonomi Keluarga

Pandemi Covid-19 menyebabkan krisis ekonomi karena berbagai sektor kehidupan mengalami kelumpuhan. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan bantuan langsung kepada masyarakat. Diantara beberapa bantuan, salah satu yang berikan bagi masyarakat adalah bantuan usaha kecil, mikro, dan menengah atau Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) (Sudiyarti, 2020). Bantuan ini diproyeksikan kepada seluruh masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menangah atau UMKM. Total pemerintah telah mengeluarkan anggaran senilai 13,4 Triliun untuk 5,6 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 provinsi. Rencananya bantuan akan menyasar kepada 12,8 juta penerima atau pemilik UMKKM. Terbaru, pemerintah berencana menambah kuota penerima menjadi 15 juta pelaku usaha mikro (Ari, 2020). Adanya bantuan tersebut menjadi kabar baik bagi para pelaku usaha mikro sehingga bantuan yang total bisa diterima pelaku usaha senilai 1,2 juta ini juga banyak menarik minat masyarakat yang juga tidak memiliki usaha mikro. Batuan BPUM ini juga menyedot perhatian para mantan pekerja perempuan dalam penelitian ini untuk proses pemulihan ekonomi keluarganya.

Pertama, pemulihan ekonomi perempuan yang dominan berharap pada bantuan pemerintah. Menurut IM (42 tahun), solusi yang ia lakukan dalam pemulihan ekonomi keluarga adalah dengan memanfaatkan peluang memperoleh bantuan dengan membuka usaha dadakan berupa berjualan kue dan gorengan di depan rumahnya. IM adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Bandung. Karena pandemi Covid-19 perusahaan tempat ia bekerja memutuskan menekan pengeluaran dan mem-PHK sebagian karyawannya, salah satunya IM. Kenyataan lain harus diterima IM karena suaminya mengalami sakit yang sudah berlangsung selama dua tahun. Suaminya tidak bisa bekerja dan hanya dirawat dirumahnya. Solusi yang bisa dilakukan dalam jangka pendek adalah dengan berjualan kue. Ia mengaku pasrah dengan keadaan karena kebingungan harus bekerja apa lagi.

> Bingung ya harus kerja apa lagi. Ibumah hanya bisa pasrah aja dengan keadaan. Daripada nyari kerjaan lain, bingung juga harus kerja apalagi, karena ibu ini udah tua, usianya segini. Itu ada yang ngasih tau, keponakan, katanyateh, "Wa cobi ngajual donat sareng bala-bala payuneun bumi, da pasti barudakmah ngarumpul cakeut bumi Uwa, cakeut lapang RW-mah (Mba, coba berjualan donat dan gorengan di depan rumah, karena biasanya banyak anak-anak berkumpul depan rumah Mba karena dekat juga dengan lapangan) (IM, Wawancara, 5 Juni 2021).

Karena kebingungan tersebut, informan IM juga sangat mengharapkan bantuan pemerintah. Makanya ketika ditanya, seberapa sering *update* dan bertanya soal bantuan pemerintah ke pihak RW? Jawabannya, sangat sering. *"Sering sekali, takut ketinggalan informasi"*. Informan IM juga menjelaskan bahwa sejak bantuan dari pemerintah ini digulirkan tahun 2020 silam, ia telah memperoleh bantuan sebanyak dua kali. Bahkan, di tahun ini ia juga sudah mendaftarkan diri kembali menjadi penerima bantuan BPUM ini. Bagi, IM bantuan dari pemerintah sangat berarti sekali bagi kebutuhan perekonomiannya terutama untuk modal usaha. *"Biasanya-mah dipake buat modal, atau beli obat, dan kebutuhan lain uangnya"* (IM, Wawancara, 5 Juni 2021).

Selanjutnya, fakta juga ditemui pada informan ES (35 tahun). Sama dengan IM, ia juga memiliki suami yang tidak bisa bekerja karena sakit. Setelah di PHK oleh perusahaan tempat ia bekerja, ES sempat melamar pekerjaan ke restoran dan kafe karena keahliannya sebagai juru masak. Namun, sampai sekarang ia tidak pernah mengetahui soal nasib lamarannya karena tidak pernah ada informasi dari perusahaan yang ia lamar. Setelah disarankan suami, ES memutuskan menjual jajanan seblak sembari dibantu suami seadanya. Namun, jualannya tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga keseluruhan karena sepi pembeli. ES pun hanya menggantungkan diri pada bantuan pemerintah lewat BPUM. *"Nggak tentu ya kalo jualanmah, tapi ya Alhamdulillah seribu-dua ribu juga segitu ada-lah untuk kebutuhan sehari-mah"* (ES, Wawancara, 6 Juni 2021). ES mengangggap bantuan dari pemerintah sangat membantu dan setiap ada pengumuman untuk mendaftar ia langsung mendaftar, bahkan tidak jarang ia mendaftarkan sang suami dan beberapa anggota keluarga lainnya sebagai penerima bantuan. Padahal, mereka tidak memiliki usaha seperti yang diharuskan oleh pemerintah sebagai salah satu syarat penerima BPUM. Hal ini dilakukan dengan alasan terpaksa karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. ES juga menjelaskan bahwa

untuk menutupi bukti, ia kadang menggunakan tempat usaha orang lain sebagai bukti bahwa sang suami atau anggota keluarganya benar-benar memiliki tempat usaha.

Hal yang sedikit berbeda dilakukan oleh MI (38) tahun. Setelah ia di PHK salah satu perusahaan di Bandung ia memutuskan untuk tidak bekerja kembali karena pasca kecelakaan lalu lintas suaminya tidak kunjung sembuh. MI hanya bergantung kepada belas kasihan orang tua dan keluarga yang lainnya karena ia bersama sang suami masih tinggal dekat dengan keluarga besarnya. Ketika bantuan pemerintah hadir, MI mendaftarkan diri dan memperoleh bantuan tersebut. Cara yang sama juga digunakan MI dengan yang dilakukan oleh ES sebelumnya yakni dengan "terpaksa" memanipulasi anggota keluarga yang tidak memiliki usaha agar memperoleh bantuan dari pemerintah dengan meminjam lokasi-lokasi usaha orang lain sebagai persyaratan. Cara ini berhasil dilakukan oleh MI dengan dalih bantuan dari pihak RT dan RW. MI juga menilai bahwa bantuan-bantuan dari pemerintah harusnya juga memperhatikan warga yang mengalami keterbatasan seperti MI dan keluarganya (MI, Wawancara, 6 Juni 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bagi para perempuan yang fokus pada bantuan dari pemerintah memiliki alasan-alasan lain kenapa mereka sangat berharap pada bantuan tersebut. Keterbatasan keterampilan dan kondisi pada anggota keluarga yang harus diperhatikan secara intens menyebabkan bantuan pemerintah adalah solusi yang harus dilakukan. Namun, usaha-usaha lainnya juga turut dilakukan meskipun tidak secara spesifik mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini senada dengan teori kuasa perempuan yang menjelaskan bahwa peran perempuan dalam keterbatasan ruang dan kondisi tidak pernah hilang. Meskipun perempuan selalu dikonstruksi sebagai makhluk yang lemah dan minim kontribusi nyatanya tidak benar. Peran perempuan dalam kehidupan kehidupan sangat vital sekali, baik dalam urusan kerumahtanggaan maupun dalam urusan ekonomi. Sayangnya, hal ini masih sedikit disadari oleh masyarakat sehingga konstruksi patriarkis masih terus berlanjut. Bukti bahwa perempuan punya peran besar dalam pemulihan ekonomi akibat krisis akibat pandemi Covid-19 adalah wujudnya.

Kedua, pemulihan ekonomi keluarga juga dilakukan oleh para perempuan yang memiliki basis keahlian lainnya seperti penguasaan pada teknologi dan media sosial. Para pekerja ini secara usia memang dominan masih muda dan kebanyakan masih memiliki satu orang anak. Mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan suami dan mampu menerapkan sistem gotong royong dalam pemulihan ekonomi keluarga. Ketika para pekerja ini di PHK oleh perusahaan, kebanyakan dari mereka menganggap ini adalah tantangan bagi jalannya kehidupan keluarga mereka. Mereka menganggap bahwa di PHK-nya dari perusahaan adalah tantangan baru untuk menemukan pekerjaan dan penghasilan lainnya. *"Mungkin takdir ya, ya kita terima saja sambal usaha nyari yang lain",* ujar R (30 tahun) (Wawancara, 24 Mei 2021). *"Kalo saya, karena suami juga pernah bisnis meskipun gagal gitu ya, ya adanya pandemi ini mungkin jadi jalan buat saya untuk ikut bantuin suami rintis usaha baru,"* ujar NSN (30 tahun), (Wawancara, Mei 24 2021). Ada juga informan yang menganggap bahwa setelah di PHK, ia jadi bisa sangat dekat dan tahu betul perkembangan anaknya. *"Yang biasanya ditinggal-tinggal kan anak gitu, apalagi masih kecil, sekarang setelah berenti (di PHK), jadi bener-bener urus anak banget aja. Urusan uang ya, yang penting dicari aja, apalagi kalo kita komit ya sama-sama (bersama suami), pastilah ada jalan",* ujar, NN (27 tahun) (Wawancara, 24 Mei 2021).

Kemudian, solusi yang mereka lakukan untuk proses pemulihan ekonomi keluarga adalah usaha sendiri. Mereka umumnya berjualan dan membuka usaha baru baik langsung maupun melalui online. Usaha langsung seperti dimanfaatkan oleh NN yang berjualan tanaman hias selama pandemi. Baginya, meskipun penghasilannya tidak benar-benar sepenuhnya mencukupi kebutuhan, namun itu sudah anugerah (NN, Wawancara, 24 Mei 2021). NSN juga melakukan hal yang sama yakni membuka bisnis baru makanan ayam pedas di depan rumahnya. Ia mengaku menjalani usaha tersebut bersama suaminya dan hasilnya cukup menguntungkan. NSN memanfaatkan platform online Whatsapp dan Instagram sebagai salah satu tempat promosi. Ia bahkan tidak segan untuk berjualan keliling ke sekitaran pemukiman dan kompleks perumahan sekaligus mempromosikan usahanya (NSN, Wawancara, 24 Mei 2021). Informan lain juga ketika ditanya soal usaha yang dikerjakan untuk pemulihan ekonomi, kebanyakan adalah membuka usaha sendiiri. Berbeda dengan informan sebelumnya, RD (32 tahun) justru membuka jasa *similarity checker* di platform jual beli online (Shopee) dan di Instagram. Ia mengaku, pengalamannya dalam dunia penulisan dan artikel ilmiah ketika kuliah dulu sangat berharga sehingga ia memutuskan membuka jasa pengecekan plagiasi. Ia juga fkcus menggaet para pelanggan dari mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Selain itu, ia juga menggunakan jasa jejaring sosial teman ketika kuliah untuk mempromosikan usaha jasanya tersebut. Bagi ibu berusia satu anak ini, penghasilannya cukup lumayan dan jika sedang beruntung penghasilannya bisa melampaui upah yang diterima sebelumnya ketika masih bekerja di

perusahaan. *"Nggak makan modal gede juga ya kelebihannya, cukup laptop, aplikasi Tutnitin premium, dan internet. Hasilnya lumayanlah bisa bantu suami juga yang memang masih guru honorer kan, gitu",* ujar RD (Wawancara, 5 Juni 2021).

Ketika ditanya tentang apakah mereka mengharapkan bantuan pemerintah semisal BPUM? Para informan ini menjawab membutuhkannya. Namun, mereka tidak terlalu berharap terhadap bantuan tersebut karena yang mendaftar dan yang layak memdapatkannya juga amat banyak. Hal ini misalnya diakui RD, menurutnya usaha mendaftar sudah ia lakukan, namun sampai pendaftaran ketiga kalinya ia justru tidak pernah mendapatkan bantuan pemerintah tersebut. Namun, RD tidak mau ambil pusing dengan bantuan pemerintah, ia lebih memilih focus pada usaha barunya di bidang plagiarism checker (Wawancara, 5 Juni 2021). Hal yang sama diakui oleh SR (33 tahun), baginya meskipun sudah mendaftarkan diri dan sudah memenuhi syarat pemenang bantuan, namun sampai sekian kali mendafttar ia tetap tidak dapat bantuan dari pemerintah. Makanya, ia mengaku lebih fokus pada usaha barunya sebagai pedagang di pasar (Wawancara, 24 Mei 2021). Pengakuan menarik dijelaskan oleh NN (26 tahun), ia merasa bahwa bantuan yang diberikan oleh pemrintah sangat tidak tepat sasaran. Menurutnya, bantuan lebih mengarah pada keluarga atau kerabat para pengurus desa dan RT dan RW. Makanya, bagi NN, daripada mengharapkan bantuan dari pemerintah sehingga harus "menyogok" petugas, lebih baik ia berusaha mendapatkan uangnya secara mandiri (Wawancara, 5 Juni 2021).

Dengan demikian, pada kelompok perempuan yang memiliki solusi alternatif lain, mereka tidak terlalu mengharap bantuan dari pemerintah. Mereka juga melakukan proses pemulihan ekonomi secara mandiri dengan memanfaatkan beberapa keahlian yang dimiliki sebagai penunjang untuk membuka usaha sendiri. Hal ini ditopang dengan kemajuan teknologi internet yang memfasilitasi mereka untuk memasarkan produk atau jasa kepada para konsumen. Meskipun demikian, para pekerja kelompok ini juga didukung oleh kekuatan lain seperti dorongan suami dan juga beban keluarga yang tidak terlalu besar.

Namun demikian, temuan dari keseluruhan menunjukkan bahwa perempuan memiliki solusi dalam pemulihan ekonomi yang kemudian diimplementasikan dalam keluarganya. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kuasa atas ekonomi dan kemampuan pengembangan finansial meskipun dilatari oleh perbedaan keahlian dan pendidikan. Para perempuan yang secara terang-terangan bersikap pasrah dan hanya mengharap bantuan pemerintah pun masih bisa mengerjakan usaha secara mandiri. Termasuk para perempuan yang dominan pada berbagai keahlian dan berlatar belakang pendidikan tinggi. Pada titik ini teori kuasa perempuan atas berbagai persoalan tampaknya terbukti. Perempuan yang selalu dianggap lemah dan non-dominan dalam aspek kehidupan nyatanya tidak benar. Di era krisis akibat pandemi Covid-19, perempuan menunjukkan "tajinya" sebagai makhluk yang dominan dan perkasa.

Beban Ganda Perempuan dalam Pendidikan Anak

Tantangan lain yang dihadapi perempuan di rumah adalah soal pendidikan sekolah anak-anaknya. Semua informan yang diwawancara masih memiliki anak yang berusia sekolah yaitu dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah. Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab lain disamping proses pemulihan ekonomi keluarga. Dulu sebelum pandemi berlangsung, tugas belajar-mengajar anak-anak kebanyakan dihabiskan di sekolah, sementara setelah pandemi para perempuan mau tidak mau harus mendidik anaknya di rumah di jam-jam sekolah. Hal ini menjadi masalah baru khususnya bagi para perempuan yang memiliki tugas ganda akibat suami mereka mengalami sakit dan tidak mampu bekerja. Selain harus berjualan, mereka juga harus memastikan keikutsertaan anaknya dalam belajar. *"Aduh, ibumah, udahmah teu apal gitu ya ke pelajarannya anak teh, terus harus bantuin ngisi soal, kan pusing"*, ujar IM (Wawancara, 5 Juni 2021). Selain itu, ada juga yang mengeluh soal ketidaktahuan atas penggunaan teknologi. *"Iya, kan kalo Ibu gitu ya nggak ngerti itu caranya gimana buka soal gitu-gitu, makanya nggak terlalu perhatian juga kalo anak sedang belajar, jadinya diateh udah ngerjain atau belum, kadang Ibu nggak tahu"*, ujar MI (Wawancara, 6 Juni 2021). Namun demikian, hal ini tidak menjadi sebuah alasan untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai pendamping pendidikan anak. *"Ibumah meski nggak ngerti tapi coba temenin ya, sambal nunggu warung di depan, iya nungguian anak gitu ya sambil dia itu ada tugas nggak dari sekolahnya",* ujar ES (Wawancara, 6 Juni 2021). Selain itu, ada juga informan yang berusaha bertanya kepada tetangganya soal sekolah anaknya, *"Kadang Ibumah suka nanya aja sama si teteh disini tetangga, tolong bantuin da gimana lagi ini si adek sekolah, suka gitu aja. Dan kebetulan tetangga ini baik, jadi mau gitu bantu",* ujar MI (Wawancara, Juni 2021).

Tidak jarang juga para informan mengeluhkan sulitnya mendidik anak ketika harus sekolah di rumah. Mereka mengaku pendidikan daring sangat tidak efektif, apalagi jika usia-usia sekolah dasar harus banyak

mengerjakan tugas (SR, Wawancara, 24 Mei 2021). Termasuk mereka juga sangat kesulitan dalam mengontrol anaknya dalam pengeluaran jajan dan bermain. Misalnya, NSN yang mengaku pengeluaran jajan dan main anaknya susah untuk dikontrol, berbeda halnya ketika masuk ke sekolah (Wawancara, 24 Mei 2021). Namun, pengakuan mengejutkan diakui oleh MI, yang lebih memilih memaksa anaknya untuk membantunya di warung ketimbang mengerjakan tugas-tugasnya dari sekolah. *"Ya, gimana lagi, daripada main terus kan, sekolah juga nggak jelas gimana, yasudah ibumah lebih baik, sok adek da kalo nggak dagang mau makan apa gitu ya, sok bantuin ibu buat beli obat bapak juga, buat kita"* (Mi, Wawancara, 6 Juni 2021). Namun, meskipun begitu MI juga tetap mengingatkan anaknya agar tetap tidak lupa mengerjakan tugas-tugas sekolah.

Sedikit berbeda dengan para perempuan yang masih didukung oleh suaminya. Mereka lebih bisa bersama-sama mengambil peran satu sama lain, termasuk dalam pendidikan anaknya. 3 dari 6 pekerja perempuan memiliki suami sebagai seorang guru honorer, makanya hal ini menjadi keuntungan tersendiri karena pekerjaan suaminya bisa berbarengan dengan jam sekolah anak-anaknya. *"Ya, alhamdulillah juga, jadi pas suami lagi ngajar online gitu, anak juga sekalian ngerjain tugas",* ujar RD (Wawancara, 5 Juni 2021). Sama halnya dengan, *"Ya, jadinya lebih kekontrol juga",* ujar R (Wawancara, 24 Mei 2021). *"Nggak terlalu masalah sih ya, meski kan anak kadang bosen juga apalagi usia SD, tapi lebih kekontrol",* ujar NN (Wawancara, 24 Mei 2021). Hal tersebut sekaligus memudahkan proses pembagian waktu antara berjualan dengan pendidikan anak sekolah. Meskipun, bagi yang berusia sekolah taman kanak-kanak, proses pembelajaran tetap tidak bisa diserahkan kepada suami. *"Usia TK tetep aja nggak bisa sama suami, jadi harus sama kita, tetep. Makanya, lumayan juga kalo sambil dagang",* ujar ST (Wawancara, 6 Juni 2021). Namun problem lain tetap dirasakan yakni ketika ditanya, apakah meskipun bisa belajar bersama dengan ayahnya yang bekerja sebagai guru, pembelajaran bagi sang anak sudah sangat ideal? Informan menjawab belum ideal. *"Jauh kalo dari idealmah, karena beda ya anak pas belajar di rumah dan di sekolah, mereka nggak bisa disipilin seperti di sekolah",* ujar SR (Wawancara, 24 Mei 2021). Hal yang sama juga diakui NN, *"Meskipun bapaknya ngajar, tapi kan dia juga harus ngurusin anak orang lain di sekolahnya, jadi ujungnya ya lari ke saya (ibunya) juga, jadi ya tetep nggak optimal",* ujar N (Wawancara, 24 Mei 2021).

Namun, soliditas antara suami dan istri tidak semua dirasakan perempuan. Pengakuan ST mengungkapkan bahwa peran pendidikan anak-anak di sekolah nyatanya masih dibebankan pada istri. Baginya, mungkin suami bisa membantu pembelajaran anaknya sesekali saja. Namun, kebanyakan yang menemani dan membantu proses pembelajaran anaknya adalah istri. Hal ini selain disebabkan karena kemauan anaknya untuk lebih nyaman belajar bersama sang ibu, pihak sekolah juga mengonstruk siswanya ketika mengerjakan tugas sekolah harus ditemani oleh ibunya masing-masing. Hal ini secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa siswa harus belajar di rumah dengan ibunya, padahal proses pembelajaran siswa juga bisa dilakukan bersama ayahnya. *"Iya, da kata bu guru juga temeninnya sama ibu aja",* ujar RD sambil menirukan gaya anaknya (Wawancara, 6 Juni 2021). Hal ini sama halnya yang dialami oleh NA, konflik bersama sang suami menyeret pada masalah sekolah anaknya yang hampir terhenti. Ia mengaku sangat kesulitan harus menemani anaknya yang masih kelas satu SMP karena ia harus bekerja dari pagi sampai sore. *"Anaknya nggak mau kalo belajar sama neneknya, katanya nggak ngerti, jadi bingung ya saya*" (Wawancara, 5 Juni 2021).

Dengan demikian, meskipun solidaritas antar lini keluarga terutama gotong royong bersama suami dalam melaksanakan pendidikan sekolah daring anak-anaknya dapat dirasakan beberapa informan, namun mayoritas perempuan tetap mengalami kesulitan dalam melaksanakan pemebelajaran sekolah di rumah. Hal ini sangat memberatkan para perempuan karena bagaimana pun anak di rumah lebih terkonstruksi kepada ibunya. Padahal di sisi lain, perempuan harus memulihkan ekonomi keluarganya. Adanya konstruksi dari sekolah kepada anaknya untuk belajar bersama ibunya menjadi kendala lainnya bagi siswa. Mereka merasa "risih" dengan kontruksi tersebut karena hanya memperkuat argumentasi bahwa pendidkan anak di rumah hanya dilaksanakan sang istri sebagai ibu rumah tangga.

Diskriminasi di Ruang Publik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan semua perempuan yang menjadi informan mengakui adanya diskriminasi yang mereka terima. Diskriminasi adalah sebuah sikap peminggiran (eksklusi) oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Diskriminasi yang dimaksud disini adalah sikap negatif yang dialami perempuan ketika menjalin relasi dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas, baik itu institusi maupun individu perseorangan. ***Pertama,*** diskriminasi yang dialami di perusahan tempat bekerja sebelum di PHK. Diskriminasi yang dialami perempuan oleh perusahaan menyangkut seputar hak yang harusnya diberikan oleh perusahaannya, yakni soal pesangon dan kejelasan alasan yang menyebabkannya di PHK perusahaan. Berdasar hasil wawancara, diketahui

ada 5 informan yang setelah dikeluarkan tidak memperoleh pesangon dari perusahaannya. Selain itu, ada dua orang informan yang tidak diberitahu alasan mengapa dirinya dikeluarkan dari perusahaan meskipun akhirnya diberitahu satu bulan kemudian melalui pesan di WhatsApp. Ketika ditanya, apa alasan pihak perusahaan tidak memberinya pesangon? Alasannya hampir sama yaitu pelanggaran SP3 dan masalah kehadiran. *"Ya, masalah kehadiran katanya"*, ujar R (Wawancara, 24 Mei 2021). Jawaban yang lain adalah*, "Katanyamah karena ada SP3 gitu, entah sayapun bingung kenapa nggak dikasihkan",* ujar NSN (Wawancara, 24 Mei 2021).

Selanjutnya, ketika ditanya tentang adakah upaya yang dilakukan untuk memperoleh hak dari perusahaan? Jawabannya sudah dilakukan. *"Ya sudah kalo diusahakanmah, datang ke sana (perusahaan), terus hubungi juga"*, ujar ES (Wawancara, 6 Juni 2021). Namun usaha para informan selalu gagal, makanya hari kian hari mereka memutusakan untuk merelakan haknya. *"Butuh mah juga ya butuh ya, buat beli obat, buat beli beras, tapi mau gimana lagi jadinya",* ujar ES (Wawancara, 6 Juni 2021). Hal lain yang juga dirasakan oleh para informan adalah pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang tidak jelas. *"Iya kalo pesangon (dikasih), tapi kalo soal alesannya nggak tau",* ujar RD (Wawancara, 5 Juni 2021). Makanya bagi SR yang dikeluarkan dengan alasan tidak jelas, pesangon adalah obat agar pekerja yang di PHK oleh perusahaan (Wawancara, 24 Mei 2021). Meskipun, RD dan SR juga telah berupaya mengejar kejelasannya namun pihak perusahaan hanya menjawabnya dengan alasan upaya efisiensi perusahaan. Bagi RD, jawaban tersebut terkesan aneh karena pemutusan hubungan kerja tidak ada pemberitahuan sebelumnya atau mendadak (Wawancara, 5 Juni 2021). Sementara itu, SR menilai bahwa pemutusan hubungan kerja yang dialaminya sangat diskriminasi karena di perusahaannya jumlah karyawan yang diberhentikan hanya 5 orang saja. Jika efisiensi keuangan diambil perusahaan, maka jumlah karyawan yang di PHK mungkin tidak akan sedikit (Wawancara, 24 Mei 2021).

Kedua, diskriminasi institusi pendidikan anak terhadap perempuan. Seperti yang sudah disinggung dalam sub bab sebelumnya, diskriminasi yang diterima para perempuan disini adalah tentang konstruksi yang diberikan institusi sekolah kepada para orangtua, khususnya perempuan. Mayoritas informan menyebut bahwa beban berlebih secara tidak langsung diberikan kepada para ibu di rumah, dimana ketika proses pembelajaran berlangsung "harus" ditemani dan dibantu oleh ibunya. Hal ini secara tidak langsung mempertahankan konstruksi patriarki dimana tugas pendidikan di rumah diserahkan kepada istri atau ibu. Meskipun demikian, tidak semua informan menyadari hal ini, namun jelas terlihat bahwa pihak sekolah menggunakan bahasa yang sama ketika menyerahkan proses pembelajaran kepada orangtuanya. Memang hal ini dilatari karena belum sepenuhnya kesadaran gender disadari oleh para perempuan, khususnya mereka yang tidak memiliki latar pendidikan tinggi dan mereka yang terus menerus menerus menerima doktrin budaya patriarki. *"Jadi secara tidak langsung, sekolah juga nggak sadar bahwa pembelajaran itu juga harus dilakukan baik sama ibu dan ayah",* ujar RD (Wawancara, 5 Juni 2021).

Ketiga, diskriminasi lingkungan sekitar terhadap peran perempuan. Diskriminasi yang diterima dari lingkungan sekitar meliputi adanya sikap membeda-bedakan yang dilakukan oleh petugas pemerintahan desa dan RT atau RW mengenai bantuan pemerintah karena dianggap yang layak menerima bantuan itu hanya mereka yang memiliki usaha mikro yang dipegang atas nama suami bukan perempuan (istri). *"Katanya harus atas nama suami, macem-macem pokoknya",* ujar NSN (Wawancara, 24 Mei 2021). Makanya, diskriminasi ini terlihat ketika ada sosialisasi bantuan misalnya BPUM dimana pihak RT atau RW itu hanya memberikan informasi pendaftaran kepada orang-orang tertentu saja yang terhubung atau punya hubungan dekat dengan ketua RT atau RW, baik itu saudara dekat maupun tetangga dekatnya. Ditambah, pihak RT dan RW berdalih bahwa bantuan hanya diberikan kepada para pemilik usaha mikro yang sudah lama berdiri, bukan pemilik usaha mikro yang baru berdiri. *"Katanya gini gitu, ah terserahlah sayamah, iya katanya yang dapet (bantuan) harus yang udah lama (berdiri), yang baru-barumah susah,"* ujar NN (Wawancara, 24 Mei 2021). Imbasnya hal ini dirasakan pada susahnya memperoleh surat izin usaha sebagai syarat pendaftaran bantuan BPUM. *"Katanya perempuan mah nanti dulu", kalo pas ngantri juga di keluarahan gitu, bapak-bapak dulu, ari pas giliran anak-anak urusan Ibu-ibu, giliran nungguin warung ibu-ibu lagi",* ujar R (Wawancara, 24 Mei 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan selama pandemi Covid-19 memang benar adanya. Bahkan, dilakukan oleh lingkungan terdekat mereka seperti lingkungan sesama warga dan lingkungan sekolah anaknya. Hal ini tentu semakin menambah diskriminasi yang dialami perempuan setelah dilakukan oleh perusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya. Hal ini senada dengan teori budaya patriarki yang menyebut bahwa dalam masyarakat yang masih kental budaya patriarkinya maka patriarki akan terjadi bahkan tanpa mengenal situasi dan kondisi. Di dalam situasi krisis akibat pandemi, seharusnya budaya patriarki harus bisa dikesampingkan oleh masyarakat agar tidak menimbulkan gap antar individu masyarakat khususnya laki-laki

dan perempuan. Namun, nyatanya budaya patriarki tetap berlangsung meski pandemi kian hari kian tinggi. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pandemi terkesan dipisahkan dengan patriarki. Padahal, melalui pandemi dan berbagai dampak negatifnya patriarki bisa dikikis sampai pada akar-akarnya karena tujuannya adalah bagaimana masyarakat mempertahankan keseimbangan satu sama lain.

Pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa perempuan memiliki kuasa atas keluarganya yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab dalam mengahadapi persoalan yang besar yang ada pada lingkungan dirinya. Ketika perempuan dihadapkan pada faktor eksternal, jalan terjal kembali ditemui yakni budaya patriarki. Hal ini dapat dijumpai dari diskriminasi yang perempuan rasakan pada ruang-ruang publik, mulai dari perusahaan yang pernah mempekerjakannya, lingkungan pendidikan anaknya, hingga lingkungan sekitarnya. Pada titik ini, persoalan menjadi sangat makro yang tidak hanya bisa diselesaikan secara individual, tetapi perlu melibatkan elemen masyarakat dan juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

4. Kesimpulan

Berbagai data dan argumen yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk paling rentan dan paling parah terdampak pandemi Covid-19 nyatanya hanya akumulasi kuantitatif yang hanya dibaca dan dikonsumsi semata. Hal ini jelas karena tidak terlihat sama sekali upaya-upaya nyata beberapa elemen masyarakat dalam melindungi dan memberikan hak-hak kepada perempuan. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perempuan dan Kementerian Ketenagakerjaan tentang tinginya kerugian yang dirasakan perempuan di masa pandemi Covid-19 hanya sekedar “angin lalu” semata bagi sebagian kalangan. Faktanya, di lapangan praktek-praktek patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan masih tinggi terjadi, bahkan para perempuan sangat tersiksa dengan fakta-fakta yang juga secara tidak disadari praktek diskriminasi dilakukan institusi terdekat seperti sekolah dan pemerintah antar rukun tetangga dan rukun warga. Hal ini jelas bukan kabar baik bagi upaya kesetaraan gender di tanah air apalagi disaat situasi dan kondisi yang sedang krisis.

Meski demikian, beban ganda perempuan di masa pandemi Covid-19 diiringi dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terhadap keluarganya. Terbukti mereka memainkan peran yang signifikan pada proses pemulihan ekonomi keluarga meskipun harus megalami pil pahit yaitu di PHK oleh perusahaan. Meski ada beberapa informan perempuan yang terkesan pasrah dan hanya menunggu bantuan pemerintah saja, namun hal itu dilakukan karena keterbatasan keterampilan dan pengetahuan serta beban suami yang sakit atau mengalami kecelakaan. Buktinya, upaya mempertahankan hidup melalui usaha kecil-kecilan dan menjaga ajegnya keluarga mereka tetap dilakukan. Di sisi lain, ada kabar baik pada para perempuan yang memiliki keterampilan lain dan pengetahuan yang baik karena proses pendidikan maksimal yang diperoleh sebelumnya. Dalam upaya pemulihan ekonomi mereka lebih mudah beradaptasi dan mengkreasi berbagai peluang sebagai ajang memperoleh penghasilan. Mereka juga tergolong berhasil berkoordinasi dengan suami mereka dalam berbagi tugas dan pekerjaan rumah tangga, meskipun ini dilandasi karena faktor usia pernikahan yang masih relatif singkat atau sedang mengalami fase keharmonisan pernikahan yang baik. Sayangnya, peneilitian ini hanya menemukan satu informan yang secara terang-terangan mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangganya khususnya dilakukan oleh suami. Berbagai hambatan dalam wawancara terhadap informan tersebut tidak berhasil mengulas problem yang ia rasakan secara komprehensif.

Meskipun begitu, penelitian ini hanya diambil dari segelintir individu dengan berbagai kesamaan yang mudah untuk dikategorisasi. Penelitian skala lebih luas perlu dilakukan untuk memotret bagaimana dampak pandemi bagi para perempuan khsususnya mereka yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan atau peminggiran.

Referensi

Acker, J. (1989). The problem with patriarchy. *Sociology*, *23*(2), 235–240.

Alon, T. M., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J., & Tertilt, M. (2020). *The impact of COVID-19 on gender equality*. National Bureau of economic research.

Ari, S. (2020, September). Pemerintah Akan Menambah Jumlah Penerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Pemerintah Akan Menambah Jumlah Penerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro. *Tribunnews.Com*.

Bainus, A., & Rachman, J. B. (2021). Covid-19 dan Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pandemi Bayangan (The Shadow Pandemic). *Intermestic: Journal of International Studies*, *5*(2), 173–186.

Bertens, K. (1993). *Etika K. Bertens* (Vol. 21). Gramedia Pustaka Utama.

Bhasin, K. (2006). What is patriarchy? Women unlimited. *New Delhi*.

Collins, C., Landivar, L. C., Ruppanner, L., & Scarborough, W. J. (2020). COVID-19 and the gender gap in work hours. *Gender, Work & Organization*.

Danaher, G., Schirato, T., & Webb, J. (2000). *Understanding foucault*. Sage.

Darmawan, D., Miharja, D., Waluyajati, R. S. R., & Isnaeniah, E. (2020). Sikap Keberagamaan Masyarakat Menghadapi Wabah COVID-19. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, *4*(2), 115–124. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i2.8596

Darsono, D., Rohmana, J. A., & Busro, B. (2020). Against COVID-19 Pandemic: Bibliometric Assessment of World Scholars' International Publications related to COVID-19. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, *5*(1). https://doi.org/10.25008/jkiski.v5i1.356

Dharmawan, A. (2021). Dasar Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Penerapan Asas No Work No Pay Bagi Pengusaha Untuk Pekerja. *Jurist-Diction*, *4*(3), 813–832.

Duckworth, A. L., & Seligman, M. E. P. (2006). Self-discipline gives girls the edge: Gender in self-discipline, grades, and achievement test scores. *Journal of Educational Psychology*, *98*(1), 198.

Fauzia, M. (2020, November). Dampak Pandemi: Indonesia Resesi, Pengangguran Tembus 9,77 Juta. *Kompas.Com*.

Foucault, M. (1997). *The politics of truth*. Semiotext.

Gordon, D. M., Edwards, R., & Reich, M. (1982). *Segmented work, divided workers* (Vol. 19820). Cambridge University Press Cambridge.

Haekal, M., & Fitri, A. (2020). Dilema Peran Ganda Dosen Perempuan Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*, *4*(2), 171–182.

Huriani, Y., & Annibras, N. R. (2019). Decision Making Process of Women Migrant Workers in West Java: The Intertwine of Religion, Culture, and Social Reality. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, Vol. 5 No. 1 (2020)*.

Jubba, H. (2021). Beradaptasi dengan Bencana: Strategi Beribadah Umat Islam dan Kristen di Tengah Pandemi Covid-19. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, *5*(1), 1–14.

Krott, M., Bader, A., Schusser, C., Devkota, R., Maryudi, A., Giessen, L., & Aurenhammer, H. (2014). Actor-centred power: The driving force in decentralised community based forest governance. *Forest Policy and Economics*, *49*, 34–42.

KSBSI. (2021). Bagaimana Perlindungan Buruh Perempuan di Tahun 2021? *Konferensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia*.

Malik, S., & Naeem, K. (2020). *Impact of COVID-19 Pandemic on Women: Health, livelihoods & domestic violence*.

McLaren, H. J., Wong, K. R., Nguyen, K. N., & Mahamadachchi, K. N. D. (2020). Covid-19 and women's triple burden: Vignettes from Sri Lanka, Malaysia, Vietnam and Australia. *Social Sciences*, *9*(5), 87.

Muttaqien, Z. (2019). Peran Perempuan dalam Tradisi Sunda Wiwitan. *Khazanah Theologia*, *1*(1), 23–39. https://doi.org/10.15575/kt.v1i1.7123

Ningrum, W. T. P., & Mas' udah, S. (2021). Family conflicts and the violence of unemployed husbands against their wives acting as the main breadwinner. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, *16*(1), 76–85.

Noorchasanah, N., & Muttaqien, Z. (2020). Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam Al-Qur'an. *Khazanah Theologia*, *1*(1), 111–118. https://doi.org/10.15575/kt.v1i1.7123

Nurcahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, *6*(01), 25–34.

Qadri, A. (2021). Bencana dan Tindakan Kepedulian Sosial dalam Keberagamaan: Studi Komparasi Kitab Suci al-Qur'an dan Alkitab. *Khazanah Theologia*, *3*(2), 105–116.

Rachman, S. A. (2020). Penguatan Peran Orang Tua Dalam Mendapingi Pendidikan Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Golden Age*, *4*(02), 322–331.

Rosmadi, M. L. N. (2021). Penerapan Strategi Bisnis di Masa Pandemi Covid-19. *IKRA-ITH EKONOMIKA*, *4*(1), 122–127.

Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, *7*(1), 71–80.

Sari, H. P. (2020, April). Menteri PPPA Sebut Hampir 30 Persen Pekerja Perempuan Kena PHK Selama Pandemi Covid-19. *Kompas.Com*.

Shahreza, D., & Lindiawatie, L. (2021). Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Depok Pada Masa Pandemi Covid-19. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, *7*(2), 148–161.

Sudiyarti, S. (2020). Kreativitas Dan Inovasi Usaha Melenial Dukung Perekonomian Negara Ditengah Pandemi Covid–19. *DEDIKASI*, *21*(2), 95–105.

Sultana, A. (2010). Patriarchy and women s subordination: a theoretical analysis. *Arts Faculty Journal*, 1–18.

Sundarasen, S., Chinna, K., Kamaludin, K., Nurunnabi, M., Baloch, G. M., Khoshaim, H. B., … Sukayt, A. (2020). Psychological impact of COVID-19 and lockdown among university students in Malaysia: Implications and policy recommendations. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(17), 6206.

Sydie, R. (1998). Sex and the sociological fathers. *Early Modern Social Theory: Selected Interpretative Readings*, 294.

Tesarik, J. (2020). After corona: there is life after the pandemic. *Reproductive Biomedicine Online*, *40*(6), 760–762.

Thorik, S. H. (2020). Efektivitas pembatasan sosial berskala besar di Indonesia dalam penanggulangan Pandemi Covid-19. *'ADALAH*, *4*(1).

Victoria, A. O. (2021, April). Sri Mulyani: Pekerja Perempuan Lebih Rentan Kena PHK di Tengah Pandemi. *Katadata.Co.Id*.

Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy* (Vol. 138). Basil Blackwell Oxford.

Walby, S., Towers, J., & Francis, B. (2014). Mainstreaming domestic and gender-based violence into sociology and the criminology of violence. *The Sociological Review*, *62*, 187–214.

Zulaiha, E. (2016). Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *1*(1), 17–26.